



This is an open access article under
CC-BY-SA license

* Corresponding Author

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SURABAYA MELALUI PENDEKATAN OPTIMALISASI BANTUAN PEMERINTAHAN KOTA

Vitriyani Anggraeni ¹, Isa Anshori ²

^{1,2} UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: yanianggraeni1222@gmail.com, isaanshori67@gmail.com

Abstract. *This study wants to assess how effective the assistance from the Surabaya city government is in improving people's welfare. Using a qualitative approach and case study design, this research investigates the assistance programs provided by the city government. Data was obtained through in-depth interviews, participatory observations, and documentation involving aid recipients and city governments. Research shows that the Surabaya city government's assistance program has a significant positive impact on community welfare. This is mainly seen from the increase in access to health services, education, and economic empowerment. However, there are several problems in implementing the program, such as non-transparency, uneven distribution, and lack of community participation in planning the program. The theme analysis shows that the success of aid optimization is greatly influenced by effective management, transparency in aid distribution, and active community participation. From these findings, the study suggests that communities should be more active in planning, better aid management, and increased supervision to ensure proper and equitable distribution. In addition, this study also emphasizes the need for regular evaluation of assistance programs to suit the ever-changing needs of the community. This research emphasizes the importance of cooperation between the city government, the community, and related institutions so that aid programs can be sustainable. So, this study is important to understand how assistance from the city government can be increased for the benefit of the community. The study also provides concrete suggestions for future programs to be better. It is hoped that these results will help in the development of clearer, more efficient, and sustainable social assistance policies.*

Keyword: *Optimization of Assistance; Community Welfare; Assistance Program; Community Participation*

Abstrak. *Penelitian ini ingin menilai seberapa efektif bantuan dari pemerintah kota Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, riset ini menyelidiki program-program bantuan yang disediakan oleh pemerintah kota. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi dengan melibatkan penerima bantuan dan pemerintah kota. Penelitian menunjukkan bahwa program bantuan pemerintah kota Surabaya memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini terutama terlihat dari peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, ada beberapa masalah dalam menerapkan program tersebut, seperti ketidaktransparan, distribusi yang tidak merata, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam merencanakan program. Analisis tema menunjukkan bahwa keberhasilan optimalisasi bantuan sangat dipengaruhi oleh manajemen yang efektif, transparansi dalam penyaluran bantuan, dan partisipasi aktif masyarakat. Dari temuan ini, studi menyarankan agar masyarakat lebih aktif dalam perencanaan, manajemen bantuan yang lebih baik, dan peningkatan pengawasan untuk memastikan pendistribusian yang tepat dan adil. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan perlunya evaluasi rutin terhadap program bantuan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. Penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah kota, masyarakat, dan lembaga terkait agar program-program bantuan dapat berkelanjutan. Begitu, studi ini penting bagi memahami cara bantuan dari pemerintah kota dapat ditingkatkan untuk manfaat masyarakat. Studi ini juga memberikan saran konkret agar program-program di masa depan dapat lebih baik. Harapannya, hasil ini akan membantu dalam pengembangan kebijakan bantuan sosial yang lebih jelas, efisien, dan berkelanjutan.*

Kata Kunci: *Optimalisasi Bantuan; Kesejahteraan Masyarakat; Program Bantuan; Partisipasi Masyarakat*



PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan utama dari pembangunan daerah. Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan warganya melalui berbagai program dan kebijakan. Sebagai pusat ekonomi dan budaya, Surabaya menghadapi tantangan besar dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, pemerintah kota terus berinovasi dan mengembangkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Salah satu strategi yang didukung oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah mengoptimalkan bantuan yang disalurkan melalui berbagai program. Bantuan ini mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Program-program ini tidak hanya memberikan bantuan secara langsung, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan sejahtera dalam jangka panjang.

Optimalisasi sumber daya pemerintah kota merupakan langkah strategis yang memerlukan perencanaan matang, pelaksanaan terstruktur, dan evaluasi berkelanjutan. Di bidang pendidikan, pemerintah memberikan beasiswa dan dana bantuan sekolah untuk menjamin anak-anak dari keluarga miskin dapat melanjutkan pendidikan mereka. Sementara itu, program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan vokasi dan pemberian modal usaha, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan kemandirian finansial. Di sektor kesehatan, upaya dilakukan untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan melalui klinik keliling dan program kesehatan gratis.

Namun, implementasi program-program ini menemui berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian meliputi transparansi penyaluran bantuan, pemerataan distribusi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan program. Pendekatan yang lebih holistik dan terbuka diperlukan untuk mengatasi tantangan ini, serta meningkatkan kapasitas pengelolaan program bantuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efisiensi optimalisasi bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis berbagai program bantuan pemerintah kota, mengidentifikasi dampak positif yang dicapai, serta mengkaji tantangan yang dihadapi. Melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, dan analisis dokumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pelaksanaan program bantuan dan memberikan rekomendasi perbaikan di masa depan.

Pendahuluan ini memandu pembaca untuk memahami latar belakang dan signifikansi penelitian ini dalam konteks kebijakan publik dan pembangunan sosial. Dengan menganalisis program bantuan yang ada, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pemahaman efektivitas program, tetapi juga memberikan pengetahuan praktis yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas optimalisasi bantuan pemerintah kota dalam meningkatkan kesejahteraan warga Surabaya. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam

tentang proses, pengalaman, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan sebagai studi kasus pada program bantuan pemerintah kota Surabaya, dengan subjek yang meliputi penerima bantuan, pemerintah kota, dan masyarakat umum. Studi kasus dipilih untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi program bantuan sosial di tingkat lokal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dengan staf Pemerintah Kota Bapemkesra dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman dan pandangan mereka terkait program bantuan sosial. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati langsung pelaksanaan program dan mengidentifikasi tantangan yang muncul di lapangan. Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data dari laporan resmi dan dokumen terkait.

Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan dan dampak program bantuan. Triangulasi data dilakukan dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data untuk memastikan akurasi dan keandalan temuan.

Aspek etika penelitian dijaga dengan menjaga kerahasiaan dan anonimitas responden serta memperoleh persetujuan dari semua partisipan. Metode penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas dan tantangan dalam optimalisasi bantuan pemerintah kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surabaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan program bantuan sosial ke depannya.

HASIL DAN DISKUSI

Kemiskinan merupakan rendahnya taraf hidup, yaitu adanya kekurangan materiil suatu kelompok atau sekelompok orang tertentu

dibandingkan dengan taraf hidup masyarakat secara umum. Banyak negara, terutama negara berkembang, menghadapi berbagai permasalahan kemiskinan. Baik individu maupun pemerintah harus serius mengatasi kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah merupakan suatu kebijakan, program, dan tindakan yang ditujukan terhadap individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang kekurangan sumber penghidupan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya secara layak. Sedangkan kesejahteraan menunjukkan situasi kehidupan yang lengkap dan tidak kekurangan, artinya seluruh kebutuhan hidup terpenuhi. Dari tiga kata definisi sejahtera, kehidupan dikatakan sejahtera apabila memenuhi sekurang-kurangnya tiga syarat, yaitu: (a) bebas dari rasa takut dan khawatir (yang berarti aman), (b) bebas dari kesulitan (yang berarti damai), (c) swasembada (artinya kaya).

Seperti pada firman Allah SWT dalam Surat Hud ayat 61 yang berbunyi: Artinya: "Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam ayat 61 Surat Hud, Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk terus bekerja (berusaha) mencari sumber penghidupan. Karena dengan bekerja kita berjuang melawan kemiskinan, meraih kekayaan, dan menciptakan kekayaan. Dalam tugas ini, Allah SWT telah memilih orang-orang yang mampu melaksanakannya (Hasimi, 2020).

Saat ini, pengangguran dan kemiskinan menjadi masalah besar di Indonesia yang harus menjadi perhatian pemerintah. Kemiskinan memiliki banyak aspek, termasuk budaya, sosial,

dan ekonomi. Jumlah penduduk miskin di suatu negara harus dianggap sebagai masalah yang serius. Kemiskinan saat ini membuat banyak masyarakat Indonesia kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka (Putra, t.t.).

Kota Surabaya adalah sebuah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Surabaya juga merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota Surabaya mempunyai potensi dan keunggulan sebagai kota industri dan komersial. Perusahaan besar, pabrik industri, dan pasar, baik modern maupun tradisional, bukanlah hal yang aneh di Surabaya. Dengan adanya potensi tersebut, maka pemerintah daerah dapat mengembangkan dan mengelolanya agar dapat dijadikan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian daerah dan pembangunan kota Surabaya. Karena adanya otonomi daerah, yaitu kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus dapat melaksanakan otonomi daerah.

Dengan keterampilan dan kinerja yang baik, diharapkan keberhasilan otonomi daerah di daerah akan terwujud dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor permasalahan dan pendukung dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah adalah faktor pendanaan dan perekonomian. Apabila daerah tersebut mempunyai sumber pendapatan yang tinggi, maka akan lebih mudah untuk menarik perhatian daerah tersebut. Pembangunan infrastruktur atau barang publik, pemberian bantuan sosial masyarakat, pendidikan, dan sejenisnya memerlukan sumber daya yang besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengetahui lebih jauh bagaimana menentukan dan mengalokasikan dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan negara dan pembangunan perekonomian daerah. Alokasi dana daerah yang baik juga mempengaruhi pembangunan daerah. Penyaluran uang yang baik juga mencerminkan

aktivitas dan kebijakan pemerintah daerah (Nisa, 2022).

Untuk mewujudkan suatu program dalam kesejahteraan, tentunya harus memiliki kebijakan dan peran aktif dari masyarakat. Negara yang sejahtera merupakan konsep yang mengindikasikan adanya tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh masyarakatnya. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut. Mewujudkan negara yang sejahtera beserta tantangan dan hambatanya, serta adanya partisipasi masyarakat, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada program bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah (Riyanto & Kovalenko, 2023).

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan di mana individu-individu dalam suatu komunitas atau masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencapai kualitas hidup yang baik, dan berkembang secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Ini meliputi berbagai aspek kehidupan yang saling berhubungan dan saling mendukung sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan harmonis bagi seluruh anggotanya. Menurut Drewnoski (1974) dan Bintartos (1989), konsep kebahagiaan dapat dilihat dari tiga sudut pandang: (1) tingkat perkembangan fisik (kondisi fisik), seperti gizi, kesehatan, angka harapan hidup, dan lain-lain; (2) tingkat psikologis (status psikologis/pendidikan), seperti kualifikasi akademik, pekerjaan, dll.; (3) integrasi dan status sosial. Tingkat kesejahteraan atau taraf hidup diukur dari sejauh mana kebutuhan dasar seseorang terpenuhi. Kebutuhan dasar mencakup beberapa elemen, seperti pangan, gizi, lapangan kerja, kesehatan, perumahan, pendidikan, komunikasi, kebudayaan, riset dan teknologi, energi, hukum, serta dinamika politik dan pengaruh ideologi (Soedjatmiko, 1998). Selain itu, pada Konferensi International Labour Organization (ILO) tahun 1976 di Jenewa,

konsep kebutuhan dasar juga ditekankan pada dua hal: pertama, konsumsi minimum keluarga, termasuk pangan, sandang, papan, dan pendidikan; kedua, pelayanan publik yang meliputi air bersih, transportasi, listrik, dan lain-lain (Bungkaes dkk., 2013).

Di Surabaya, Pemerintah Kota berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan bantuan yang diadakan oleh Pemerintah untuk mendukung masyarakat Indonesia yang menghadapi risiko ekonomi dan sosial. Adanya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kualitas hidup mereka (Antarnews.com, 2024). Program-program tersebut dirancang untuk memperbaiki pendidikan, ekonomi, serta mengatasi ketimpangan sosial.

Peningkatan Kesejahteraan

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan sinkronisasi dan koordinasi antar seluruh instansi serta masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan suatu program bantuan dari Pemerintah Kota. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata "sejahtera" yang artinya selamat, tenteram, sukses, dan aman. Dalam pengertian ini, kesejahteraan mengacu pada keadaan yang baik, yakni keadaan di mana masyarakat dapat hidup sehat, sejahtera, dan damai. Kesejahteraan juga dapat diartikan sebagai keadaan seseorang yang terbebas dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan ketakutan, sehingga dapat hidup dengan baik dan nyaman, baik lahir maupun batin (Sari & Sanjani, 2023).

Kaitannya dengan program bantuan adalah bahwa untuk menjalankan program yang efektif bagi kesejahteraan masyarakat, diperlukan partisipasi masyarakat yang ikut andil, serta instansi dan staf pemerintahan untuk

mengorganisir program agar tertata dan berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada (Arliman, 2017). Pemerintah Kota telah menjalankan beberapa program melalui Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra).

Proses kebijakan program bantuan sosial di Bapemkesra menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah atau hambatan yang pasti akan ditemui. Masalah tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Dalam program tersebut, Bapemkesra berperan penting sebagai pelaksana untuk menangani permasalahan yang muncul. Bapemkesra wajib mengetahui keadaan masyarakat yang menerima bantuan sosial, termasuk wilayahnya, data diri penerima, dan tingkat ekonomi mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan publik yang jelas mengenai program bantuan sosial, agar penyaluran dana bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Program bantuan yang ada di Bapemkesra melalui proses seleksi penerima bantuan. Pengumuman seleksi dilakukan di setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya. Setelah pengumuman, masyarakat yang memenuhi syarat dapat mengajukan diri. Jika pendaftar memenuhi persyaratan, staf penyelenggara bantuan akan mengunggah data pendaftar secara digital dan melakukan verifikasi. Setelah verifikasi, para pendaftar yang lolos akan diundang untuk berkumpul di lokasi yang sudah diinformasikan. Lokasi yang biasa digunakan adalah Gelanggang Remaja Surabaya di Kecamatan Tambaksari. Beasiswa Pemuda Tangguh juga memiliki proses serupa, namun pendaftarannya dapat dilakukan secara online melalui web atau link yang telah disediakan, tanpa harus melalui tahapan kelurahan atau kecamatan (Kurniawan dkk., 2020).

Program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya

melalui Bapemkesra Kota Surabaya mencakup dua bidang utama, yaitu pengentasan kemiskinan dan fasilitasi kegiatan keagamaan. Bapemkesra juga memiliki beberapa program pemberdayaan berupa pemberian biaya operasional kepada marbot, modin, dan hafidz, serta program beasiswa untuk siswa SMAN, SMAS, SMKN, dan SMKS di Kota Surabaya. Beasiswa yang diberikan kepada siswa tersebut disebut Beasiswa Pemuda Tangguh. Beasiswa Pemuda Tangguh bertujuan untuk mendukung dan memberikan kesempatan kepada pemuda yang memiliki bakat dan prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Marbot adalah sebutan untuk seseorang yang ditugaskan merawat dan membersihkan masjid, termasuk menyapu dan mengepel halaman, serta bertanggung jawab terhadap ibadah sholat sebagai muadzin atau imam jika yang bersangkutan tidak dapat hadir. Sebagai seorang marbot, jasa mereka dihargai, baik dengan gaji bulanan maupun santunan pada hari-hari tertentu, seperti menjelang Idul Fitri dan Idul Adha (Marbot Masjid: Pengertian dan Tupoksi, t.t.). Proses kerja marbot melibatkan menjaga kebersihan rumah ibadah di wilayah Kota Surabaya, agar masyarakat setempat dan pendatang merasa nyaman saat beribadah. Modin, yang bertugas merawat jenazah dan memimpin tahlilan di rumah duka, adalah jabatan yang penting dalam masyarakat pedesaan dan juga ada dalam struktur Pemerintahan Desa (Sutopo, 2022).

Penghasilan yang diberikan kepada marbot dan modin melalui program bantuan sosial Bapemkesra berupa uang tunai. Marbot menerima penghasilan sebesar Rp400.000 per bulan, dan modin sebesar Rp800.000 per bulan, yang disalurkan melalui transfer ke rekening penerima masing-masing sesuai dengan data yang ada. Program bantuan ini memberikan dukungan yang berarti bagi marbot dan modin,

yang dapat meningkatkan semangat dan ikhlas dalam menjalankan tugas mereka.

Program Beasiswa Pemuda Tangguh memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp200.000 per bulan serta seragam sekolah dan sepatu. Namun, penerima Beasiswa Pemuda Tangguh yang menerima seragam dan sepatu tidak mendapatkan uang tunai, dan sebaliknya, penerima uang tunai tidak menerima seragam dan sepatu. Pembayaran untuk program ini dilakukan melalui transfer tanpa adanya potongan biaya.

Gambar 3. 1 Pendistribusian seragam beasiswa pemuda tangguh



Pada gambar 3.1 di atas merupakan salah satu kegiatan dari program bantuan yang dilakukan oleh Bapemkesra. Salah satu program Pemerintah yang diharapkan dapat membantu siswa dan siswi dalam bidang pendidikan adalah melalui Beasiswa Pemuda Tangguh, yang diadakan oleh Bapemkesra (Agusman, 2019). Beasiswa Pemuda Tangguh adalah program beasiswa yang ditujukan bagi pemuda Surabaya yang saat ini duduk di kelas 10 dan kelas 11 SMA/SMK/MA, baik negeri maupun swasta, serta siswa kelas 9 SMP/MTs yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK/MA sederajat (Pemuda Tangguh Pemerintah Kota Surabaya, t.t.).

Pendistribusian ini dilakukan di Gelanggang Remaja Surabaya di Kecamatan Tambaksari. Para panitia pendistribusian melakukan proses pembagian seragam sekolah dan sepatu sesuai dengan ukuran penerima yang sudah diambil dari data yang ada di berbagai sekolah penerima Beasiswa Pemuda Tangguh. Tim panitia dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaannya. Pada pendistribusian ini, peneliti memiliki kesempatan untuk ikut serta berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Sekitar 12.000 seragam yang telah siap dibagikan dalam waktu cepat kepada perwakilan tiap sekolah, yang terdiri dari minimal 3 orang staf guru dan rekannya di Gelanggang. Pendistribusian dilakukan dengan daftar ulang terlebih dahulu yang dilakukan oleh staf pihak sekolah penerima pada panitia daftar ulang, lalu diarahkan ke lokasi pengambilan seragam dan sepatu yang sudah disiapkan oleh panitia pendataan dan panitia penerima.

Optimalisasi Bantuan Sosial Pemerintahan Kota

Untuk memastikan bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Bapemkesra berjalan efektif, optimal, dan efisien, perlu dilakukan evaluasi kelayakan penerima bantuan. Evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang membantu pembuat keputusan dalam memastikan program sesuai dengan standar yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara sistematis untuk memahami kegunaan, manfaat, dan hambatan yang mungkin muncul dalam suatu kegiatan. Fungsi evaluasi adalah untuk mengontrol pelaksanaan program serta mengukur sejauh mana program berhasil mencapai tujuannya, yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Supiani dkk., 2020).

Proses evaluasi kelayakan harus dilakukan melalui kebijakan yang ada, agar pemberian bantuan sosial tepat sasaran dan bermanfaat bagi penerima (Rahmawati & Darmawan, 2022).

Program bantuan sosial oleh pemerintah, melalui Bapemkesra, bertujuan untuk membantu masyarakat dengan latar belakang ekonomi kurang mampu. Pelaksanaan program ini tidak tanpa tantangan. Beberapa masalah yang mungkin timbul terkait dengan pelaksanaan program yang dijalankan oleh Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) harus ditangani dengan bijak. Bapemkesra perlu mengetahui keadaan masyarakat penerima bantuan, termasuk wilayahnya, data pribadi penerima, dan tingkat ekonomi mereka. Oleh karena itu, kebijakan publik yang tepat sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran program ini. Kebijakan publik berfungsi sebagai alat bagi seluruh aktivitas pemerintahan dan masyarakat untuk berjalan dengan baik (Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, t.t.).

Tujuan dari adanya kebijakan publik pada proses program bantuan yaitu agar penyaluran dana bantuan di masyarakat tepat sasaran pada masyarakat yang lebih berhak menerima bantuan. Pemerintah dituntut untuk selalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya, namun sebagian besar masyarakat masih belum terlibat dalam setiap rencana atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Menurut Walikota Surabaya, dalam penerapan Pasal 10(5), Pasal 30(4), Pasal 41(2), Pasal 45(3), Pasal 92(4), Pasal 104(3) dan Pasal 115 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kependudukan, dan dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan dan persyaratan pengelolaan kependudukan, perlu dicantumkan suatu Peraturan Walikota.

Pelayanan publik harus berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga pelayanan publik memerlukan inovasi. Siring berkembangnya teknologi, semakin banyak aktivitas dan hal yang dilakukan dengan menggunakan alat digital online. Di pemerintahan, banyak lembaga yang

memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat. Harapannya, pelayanan publik bisa lebih transparan dan masyarakat lebih mudah terhubung dengan layanan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE). SPBE diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, bermutu, dan kredibel.

Pada program bantuan yang ada di Bapemkesra memiliki proses seleksi penerima bantuan. Proses seleksi bantuan dengan memberikan pengumuman terlebih dahulu di tiap kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Surabaya. Tetapi sebelumnya bapak camat dan lurah dalam melakukan sosialisasi langsung di lapangan, warga dapat berkumpul di balai RW atau melakukan sosialisasi dengan door to door untuk memperkenalkan program tersebut. Dikendukapil Kota Surabaya dan Kantor Kelurahan adalah instansi pemerintah yang menangani pelayanan kependudukan, seperti pencatatan data penduduk, keperluan surat menyurat, dan pengelolaan bantuan sosial. Pelayanan publik ini harus terus ditingkatkan dan mengikuti perkembangan teknologi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Chrisdianti, 2022). Dengan demikian, Pemerintah Kota Surabaya mengadakan program terkait bagi warga Surabaya.

Setelah mendapat pengumuman dari tiap kecamatan dan kelurahan masing-masing. Mereka mengajukan diri dengan syarat yang sudah ada. Jika pendaftar memenuhi persyaratannya, maka staff penyelenggara bantuan akan mengupload data pendaftar secara digital dan dilakukannya verifikasi. Ketika sudah melewati persyaratan yang ada para pendaftar yang sudah terdaftar diundang untuk datang

berkumpul di lokasi yang sudah di informasikan. Lokasi yang biasa digunakan berada di Gelanggang Remaja Surabaya di Kecamatan Tambaksari. Untuk beasiswa pemuda tangguh juga sama halnya, namun beasiswa pemuda tangguh dapat melakukan pendaftaran sendiri secara online pada web atau link yang sudah disediakan. Tanpa harus melalui tahapan dari kelurahan ataupun kecamatan.

Banyak unit pemerintahan di berbagai Dunia telah merangkul revolusi digital, mengubah cara kita mengakses dan berbagi informasi. Tidak hanya publikasi ilmiah dan jurnal yang kini tersedia di web, tetapi juga berbagai basis data dari seluruh dunia. Perpustakaan digital, arsip sejarah, dan catatan medis semuanya dapat diakses dengan mudah melalui internet. Selain itu, layanan pemerintah yang sebelumnya hanya dapat diakses secara langsung kini telah beralih ke platform daring, memungkinkan warga untuk mengurus dokumen, membayar pajak, dan menerima layanan lainnya tanpa perlu meninggalkan rumah. Ini menciptakan aksesibilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, mempercepat proses administrasi, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk tetap terhubung dengan layanan publik, bahkan dari lokasi yang jauh. Dengan perkembangan ini, masyarakat global dapat memanfaatkan sumber daya yang lebih luas dan beragam, mendukung pendidikan, penelitian, dan inklusi digital yang lebih besar. Sebagian besar kota-kota terkemuka di Eropa, AS, dan Asia telah menerima TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan teknologi hijau sebagai metode untuk menyegarkan peluang ekonomi dan meningkatkan keunggulan global mereka. Inisiatif-inisiatif ini meliputi aplikasi skala kecil teknologi bersih individu hingga proyek-proyek ambisius. Mereka bertujuan untuk merombak seluruh wilayah perkotaan dengan strategi perencanaan induk dan pembangunan

infrastruktur. Teknologi yang diperlukan untuk melakukan ini mencakup berbagai bidang dan harus diintegrasikan dalam sistem yang kompleks agar efektif. Walaupun praktik sebenarnya sering kali masih terpecah-pecah, namun penerapan di dunia nyata umumnya melampaui pembahasan apa pun dalam literatur akademis yang dapat digeneralisasi (*Towards an effective framework for building smart cities: Lessons from Seoul and San Francisco - ScienceDirect*, t.t.).

Bapemkesra meleuncurkan aplikasi Inovasi ini merupakan teknologi yang lahir di masa pemerintahan Eri Cahyadi. Aplikasi ini diluncurkan untuk memudahkan masyarakat Surabaya mengurus dokumen pendaftaran bantuan secara online, sehingga warga dapat mengelola dokumen bantuan mereka secara mandiri. Dalam pelaksanaan program ini, penulis bersama staf kelurahan diwajibkan untuk didampingi setidaknya oleh seorang camat dan lurah. Guna dari lurah dan camat rintisan tersebut adalah untuk membantu pelayanan apabila masyarakat mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen atau mengakses aplikasi, mereka dapat meminta bantuan kepada lurah atau camat setempat. Program ini juga bertujuan untuk membangun kerjasama pelayanan dan pemererat kebersamaan di lingkungan masing-masing. Eri Cahyadi menyatakan bahwa program ini adalah bagian dari upaya melibatkan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, masih ada tantangan, khususnya terkait akses teknologi dan keterbatasan waktu.

Optimalisasi bantuan sosial, peningkatan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pengembangan digital serta kolaborasi pemangku kepentingan adalah Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mengembangkan dan memperbaiki program tersebut (Dharma dkk., 2024)

Berdasarkan faktor tersebut, penting untuk mempertimbangkan kembali peluncuran program ini di wilayah terkait. Program ini masih dalam tahap peninjauan ulang terhadap kepala camat dan lurah yang terpilih, sebelum disahkan dan diberikan kepada pengguna secara resmi. Data valid berkaitan dengan intervensi pemerintah dalam memberikan bantuan untuk menangani kasus kemiskinan dan anak putus sekolah, serta dalam usaha mewujudkan pemerataan fasilitas publik. Karena program di Kelurahan terkait belum berjalan dengan baik, petugas kelurahan bersama rekan dari magang mengoptimalkan pelayanan di setiap Balai RW. Langkah ini diambil untuk menjangkau warga dalam pelayanan dokumen. Dalam kegiatan ini, penulis terjun langsung ke lapangan membantu warga yang mengalami kesulitan dalam proses administrasi dan unggah berkas. Optimalisasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh warga mendapatkan pelayanan yang maksimal dan tepat waktu, sehingga semua kebutuhan administrasi dapat terpenuhi dengan baik

Selain terdapat hambatan dalam bidang teknologi dan dokumen, terdapat beberapa problema yang terjadi pada pelaksanaan bantuan sosial di Kota Surabaya. Pertama, proses pengajuan yang membutuhkan waktu begitu lama. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan yang memadai di kalangan warga masyarakat mengenai program ini (Daud & Marini, 2018). Program bantuan sosial memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh warga kurang mampu agar proses pengajuan dapat divalidasi. Dalam beberapa kasus, warga yang tergolong kurang mampu tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang prosedur dan persyaratan yang harus dilengkapi. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang intensif dan sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat. Pemerintah kota harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengedukasi warga tentang program ini,

termasuk mekanisme pengajuan dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Kedua, dalam melaksanakan program bantuan juga membutuhkan waktu yang lama. Proses pencairan bantuan antara termin 1 ke termin 2 atau antara termin 2 ke termin 3 seringkali terhambat. Hal ini mengakibatkan tertundanya pelaksanaan program bantuan sosial di Kota Surabaya oleh Badan Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra). Penundaan ini tidak hanya memperlambat bantuan yang seharusnya segera diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan penerima bantuan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan perbaikan dalam sistem administrasi dan birokrasi, serta peningkatan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penyaluran bantuan.

Selain itu, transparansi dalam proses penyaluran bantuan masih menjadi tantangan besar. Banyaknya laporan mengenai distribusi yang tidak merata dan kurangnya akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Transparansi dapat ditingkatkan melalui publikasi laporan berkala mengenai penyaluran bantuan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi program.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program juga perlu ditingkatkan. Rendahnya partisipasi masyarakat seringkali membuat program bantuan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah kota perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dengan demikian, program yang dijalankan akan lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penyediaan teknologi yang memadai untuk mengelola data dan informasi terkait program bantuan sosial sangat penting. Sistem informasi yang terintegrasi akan mempermudah proses administrasi, pengawasan, dan evaluasi program. Penggunaan teknologi juga dapat membantu mempercepat proses pencairan dana dan memastikan distribusi yang lebih merata dan tepat sasaran.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah Kota Surabaya perlu membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program bantuan sosial. Kemitraan ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga evaluasi program.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efisiensi optimalisasi bantuan dari pemerintah kota Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif dianalisis dengan menggunakan berbagai program bantuan pemerintah kota dan diidentifikasi dampak positif yang dicapai serta tantangan ke depan. Melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi dan analisis dokumen, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan program bantuan dan memberikan rekomendasi perbaikan di masa depan. Pendahuluan ini memandu pembaca untuk memahami latar belakang dan signifikansi penelitian ini dalam konteks kebijakan publik dan pembangunan sosial. Dengan menganalisis program bantuan yang ada, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pemahaman efektivitas program, tetapi juga memberikan pengetahuan praktis yang dapat digunakan Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kemiskinan merupakan keadaan di mana individu atau kelompok masyarakat menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, yang menyebabkan kualitas hidup mereka lebih rendah daripada kebanyakan orang. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, kemiskinan adalah masalah yang sangat serius. Jadi, kerjasama antara pemerintah dan individu sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Penanggulangan kemiskinan merupakan serangkaian kebijakan, program, dan tindakan yang memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu mendapatkan penghidupan yang mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Dalam konteks ini, kesejahteraan bermakna mencapai keperluan hidup secara utuh, meliputi keamanan, ketenangan, dan keberhasilan ekonomi. Salah satu sumber ajaran agama yang dapat dijadikan rujukan dalam mengatasi kemiskinan adalah seperti yang tercantum dalam Surat Hud ayat 61. Ajaran tersebut mengajarkan pentingnya bekerja keras untuk mencari rezeki dan menciptakan kesejahteraan.

Surabaya, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki potensi besar di sektor industri dan komersial yang bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah Surabaya diharapkan dapat mengelola potensi tersebut dengan baik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan otonomi daerah. Semoga pemerintah daerah Surabaya mampu memanfaatkan potensi yang ada dengan optimal demi mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan otonomi daerah. Dengan pendapatan daerah yang tinggi, pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan sosial, dan berbagai program sosial lainnya bisa terlaksana dengan lebih baik. Namun, pengelolaan dana yang efektif dan efisien menjadi hal yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan pembangunan

dan kesejahteraan masyarakat. Agar kesejahteraan masyarakat tercapai, perlu adanya keterlibatan aktif dari masyarakat dan penerapan kebijakan yang sesuai.

Kesejahteraan masyarakat memperhatikan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai kualitas hidup yang baik dalam berbagai aspek. Ini meliputi aspek fisik, mental, sosial, maupun ekonomi. Salah satu cara menuju kesejahteraan adalah dengan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan hal-hal lainnya. Pemerintah Surabaya telah merancang beberapa program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program-program ini menyediakan bantuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, serta berusaha mengatasi ketimpangan sosial. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, instansi terkait, serta masyarakat.

Salah satu hal yang penting adalah sinergi yang terjadi dalam menjalankan program bantuan sosial. Kesejahteraan masyarakat turut dipengaruhi oleh keberhasilan kebijakan bantuan sosial yang tepat sasaran. Terutama untuk masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi lemah. Pemerintah Kota Surabaya, melalui Bapemkesra, berperan penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial ini. Program bantuan yang ada, seperti beasiswa untuk pemuda tangguh dan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan untuk marbot, modin, dan hafidz, bertujuan untuk memberikan dukungan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di kalangan masyarakat. Namun, penerapan program bantuan sosial ini tetap dihadapkan pada beragam tantangan.

Salah satu isu yang sering dialami adalah proses seleksi penerima bantuan yang kadang-kadang memakan waktu lama dan terlambat.

Disamping itu, satu lagi hal ialah distribusi teknologi yang belum merata, yang turut berdampak pada proses pendaftaran bantuan secara online. Namun, pemerintah Kota Surabaya tetap berupaya melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi program bantuan sosial. Salah satunya adalah dengan meluncurkan aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan bantuan secara online. Meskipun ada beberapa rintangan terkait teknologi dan aksesibilitas, program ini menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dapat dioptimalkan dengan baik. Agar program bantuan sosial dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu dilakukan evaluasi yang cermat terhadap kelayakan penerima bantuan dan pengelolaan dana yang transparan. Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) buat ngasih pelayanan yang lebih baik sama mempermudah warga buat akses bantuan. Meskipun ada tantangan terkait keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang program bantuan dan hambatan dalam proses pengajuan, upaya untuk meningkatkan sosialisasi dan dukungan teknologi diharapkan dapat mempercepat proses pelaksanaan program bantuan sosial.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program bantuan sosial sangat terkait dengan koordinasi yang efektif di antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai instansi terkait. Keberhasilan dalam penyaluran bantuan tidak hanya bergantung pada perencanaan yang matang, melainkan juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dan penggunaan teknologi yang tepat. Peneliti berikut dapat lebih lanjut mengeksplorasi efektivitas penggunaan teknologi dalam mempercepat distribusi bantuan sosial, serta memperdalam kajian mengenai hambatan sosial dan budaya yang

mungkin mengalangi masyarakat dalam mengakses bantuan. Pemerintah juga disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang program bantuan sosial agar dapat meminimalisir kesalahan dalam proses seleksi dan pengajuan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, Y. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 105–113. <https://doi.org/10.22225/pi.4.2.2019.105-113>
- Antaraneews.com. (2024, Juli 24). Pengertian bansos, jenis dan tujuannya. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/4212894/pengertian-bansos-jenis-dan-tujuannya>
- Arliman, L. (2017). Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387–402.
- Bungkaes, H. R., Posumah, J. H., & Kiyai, B. (2013). Hubungan efektivitas pengelolaan program raskin dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/1380>
- Chrisdianti, M. P. (2022). Implementasi sistem pengendalian internal pemerintah atas pengelolaan dana bantuan sosial rumah tidak layak huni di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur [PhD Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/10788/>
- Daud, M., & Marini, Y. (2018). Implementasi program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 2(1), 29–38.
- Dharma, R., Saputra, A., & Firdaus. (2024). Pengembangan ekonomi masyarakat

- melalui optimalisasi manajemen penyaluran bantuan sosial dengan data analytics dan teknologi informasi di Koto Parak berbasis kuesioner. *Jurmas Bangsa*, 2(2).
<https://doi.org/10.62357/jpb.v2i2.337>
- Hasimi, D. M. (2020). Analisis program bantuan pangan non-tunai (BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. *Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(1), 61–72.
<https://doi.org/10.24042/revenue.v1i01.5762>
- Kurniawan, R., Takdir, T., Iskandar, H., & Asmara, R. (2020). Optimalisasi pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 6(2), 126–149.
- Marbot masjid: Pengertian dan tupoksi. (n.d.). Masjid Raya Al Jabbar. Diakses pada 9 November 2024, dari <https://masjidrayaaljabbar.com/marbot-masjid-pengertian-dan-tupoksi/?form=MG0AV3>
- Nisa, S. (2022). Peranan pengalokasian keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3(1), 91–99.
<https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i1.809>
- Pemuda Tangguh Pemerintah Kota Surabaya. (n.d.). Diakses pada 9 November 2024, dari <https://pemudatangguh.surabaya.go.id/>
- Putra, A. A. (n.d.). Efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial pada masyarakat di Kota Palu.
- Rahmawati, E. D., & Darmawan, A. (2022). Optimalisasi program Kalimasada melalui layanan Klampid di Dispendukcapil Kota Surabaya (studi Kelurahan Menur Pumpungan). *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(6), 117–125.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi masyarakat menuju negara kesejahteraan: Memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Sari, I. F., & Sanjani, M. R. (2023). Dampak evolusi perlindungan sosial terhadap kesejahteraan sosial dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1080–1087.
- Studi kebijakan publik dan pelayanan publik: Konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik. (n.d.). UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya. Diakses pada 9 November 2024, dari https://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/akasia/index.php?p=show_detail&id=12287&keywords=
- Supiani, S., Setiawati, B., & Suryani, L. (2020). Evaluasi pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai (BPNT) pada e-warong di Desa Harus Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 3(2).
- Sutopo, U. (2022). Kedudukan modin dalam perspektif hukum positif. *El-Dusturie*, 1(1).
<https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4067>
- Towards an effective framework for building smart cities: Lessons from Seoul and San Francisco. (n.d.). *ScienceDirect*. Diakses pada 9 November 2024, dari <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040162513002187>